

RESENSI BUKU



- Judul : **Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional**
- Pengarang : Agus Pramusinto, Wahyudi Kumorotomo (ed)
- Penerbit : Yogyakarta : Gava Media, 2009
- Kolasi : xxv, 405 hal, 14 x 21 cm
- ISBN : 978-979-1078-92-4

Proses reformasi yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah membawa babak baru dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Reformasi yang ditandai dengan perubahan tatanan sistem politik, munculnya partai politik baru serta tuntutan pemerintahan yang profesional, transparan, responsif dan akuntabel ternyata dalam implementasinya ibarat jauh panggang dari api. Banyak persoalan yang muncul dalam membangun kelembagaan instrumen demokrasi. Sejumlah persoalan seperti derajat pelembagaan partai politik yang rendah, kurangnya profesionalisme birokrasi, praktek korupsi serta kuatnya tarikan kepentingan politik menyebabkan upaya untuk membangun kelembagaan politik dan birokrasi yang profesional menjadi sulit tercapai.

Berpijak pada persoalan itu dan bertepatan dengan Dies Natalis Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada (MAP- UGM) Yogyakarta yang ke – 15 pada tahun 2008 digelar *seminar* yang melibatkan politisi, pakar, praktisi, birokrat dan pengamat yang selama ini menggeluti masalah politik dan pemerintahan untuk mencari formulasi atas beragam persoalan tersebut. Makalah hasil *seminar* itu kemudian dibukukan dan diberi judul *Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*.

Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo (ed-) merangkum bahwa upaya untuk mewujudkan reformasi pemerintahan (*governance reform*) di Indonesia harus dilaksanakan melalui empat hal, yakni penataan ulang demokrasi, penguatan birokrasi, pemberantasan korupsi serta pembangunan budaya birokrasi. Beberapa persoalan di tingkat pelembagaan demokrasi ini harus menjadi fokus utama jika ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Buku yang terdiri dari 405 halaman ini terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab dipilah sesuai dengan tema dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melembaga. Bagian pertama buku ini membahas mengenai perlunya penataan ulang demokrasi yang kini berlangsung di Indonesia. Esensi demokrasi berupa partisipasi masyarakat dalam setiap proses politik ternyata belum memenuhi harapan. Parlemen yang diharapkan memainkan peran

kontrol terhadap pemerintahan justru gagal menjalankan perannya. Ada beragam usulan yang muncul untuk melembagakan proses demokrasi, antara lain dengan melakukan revisi terhadap kerangka kerja perundang-undangan, regulasi yang menaungi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, memperbaiki sistem kepartaian serta sistem politik. Kinerja parpol yang menjadi instrumen demokrasi selama 10 tahun terakhir juga banyak dibahas. Dalam evaluasi itu terlihat parpol yang menjadi instrumen demokrasi mengalami kegagalan dalam menjalankan peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat.

Penguatan birokrasi secara kelembagaan menjadi tema sentral kedua pada buku ini. Bagian ini terdiri dari tujuh makalah dan memaparkan kondisi birokrasi di tengah perubahan sistem politik yang sekarang. Birokrasi masih dinilai tidak berubah, kurang profesional, serta tidak memiliki disiplin dan etos kerja. Di sisi lain, birokrasi juga dihadapkan pada kuatnya intervensi politik, tidak ada arah pengembangan karir yang jelas serta rendahnya gaji. Pada bab ini ditawarkan konsep reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerja aparatur pemerintah. Solusi itu yakni memperbaiki arah pengembangan karir aparatur, sistem penggajian, dan perlunya pembentukan Komisi Kepegawaian Negara. Bagian terakhir bab kedua juga memaparkan studi kasus reformasi birokrasi pada kabupaten Gorontalo, Kulon Progo dan Boyolali. Terungkap bahwa memperbaiki birokrasi memang bukan hal yang mudah mengingat budaya kerja yang selama ini melingkupinya.

Selanjutnya bab ketiga buku ini memaparkan reformasi birokrasi sebagai kunci pemberantasan korupsi. Buruknya kinerja birokrasi selama ini menjadi penyebab utama terjadinya praktek korupsi. Kolaborasi antara birokrasi dan para pemburu rente juga menciptakan pasar korupsi yang merugikan keuangan negara. Implikasi dari praktek itu akhirnya berimbas pada macetnya program pembangunan di pusat dan daerah. Untuk mencegah terjadinya korupsi, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan, redefinisi peran birokrasi, menerapkan sistem teknologi informasi komunikasi, mencegah monopoli kekuasaan dan menjaga akuntabilitas laporan kinerja pemerintahan.

Bab terakhir buku ini membahas mengenai pembangunan budaya birokrasi. Birokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan, kolonial, orde lama, orde baru hingga orde reformasi. Beban sejarah tersebut sangat memengaruhi pola kerja birokrasi hingga sekarang. Birokrat masih terkungkung *mindset* lama. Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah jika ingin berhasil juga harus menjangkau dimensi budaya.

Tidak hanya membahas masalah budaya birokrasi, bab keempat juga memotret posisi dan relasi birokrasi di era sistem pemilihan langsung. Sepanjang perjalanannya birokrasi selalu diposisikan sebagai alat kekuasaan. Akibatnya birokrasi ditempatkan sebagai subordinasi politik. Posisi inilah yang membuat birokrasi menjadi tidak bebas nilai. Keberhasilan yang dicapai birokrasi pun akhirnya menjadi sangat tergantung pada kapasitas, ketrampilan dan kompetensi seorang pemimpin dalam mengelola kekuasaan yang dijalankannya.

Hal menarik dalam bab ini adalah pembahasan yang dilakukan oleh Prof. Miftah Thoha menyangkut posisi birokrasi di era liberalisasi politik (hal 303-308). Thoha

menawarkan konsep reposisi birokrasi dengan dua model pendekatan. Apakah birokrasi menjadi subordinasi atau sejajar dengan politik. Pembahasan ini seolah melengkapi analisis dari para penulis yang melupakan faktor pejabat politik dari luar birokrasi yang mewarnai kinerja birokrasi. Hanya saja, pembahasan yang dilakukan tidak terlalu dalam namun cukup memancing kesadaran kritis pembaca menyangkut konstelasi politik yang terjadi di tingkat lokal.

Secara umum buku yang merupakan bunga rampai hasil seminar menawarkan solusi alternatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Namun tawaran yang disajikan masih menggunakan frame berpikir normatif. **(Budi Prayitno)**